

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sejatinya merupakan satu hal yang penting bagi sebuah negara. Pada hakikatnya, pembangunan sebagai usaha proses transformasi yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik, sejahtera, tentram serta menjamin kelangsungan hidup. Pembangunan juga menghendaki adanya perubahan yang merupakan proses dan usaha yang diarahkan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Jika kita tinjau kembali, pembangunan merupakan salah satu agenda yang sangat penting sedari awal kemerdekaan Republik Indonesia, dimana tujuan pembangunan termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan-tujuan tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.¹

Pembangunan biasanya melekat dengan konteks kajian suatu perubahan yang ditunjukkan sebagai bentuk perubahan yang bersifat terencana, sehingga pembangunan dikatakan sebagai proses perubahan yang mencakup sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi kelembagaan serta

¹ Lusy Octaviyanti, dkk (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cikaobandung Purwakarta. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 9 (9). Hlm: 3448

budaya.² Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan secara sadar merupakan bagian dari perubahan dan pertumbuhan, sehingga pembangunan yang demikian dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu bangsa untuk dapat bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan terhadap segala situasi yang terus bergerak dan berubah. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan perlu dipandang tidak hanya dari capaian akhirnya saja, melainkan juga dari kualitas sistem yang menopang prosesnya secara keseluruhan.

Politik memiliki peranan penting dalam proses pembangunan karena menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan publik. Sistem politik yang berjalan dengan efektif akan mampu menciptakan stabilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, sehingga pembangunan tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup dinamika politik. Pemahaman akan pentingnya peran politik dalam pembangunan akan menghadirkan konsep pembangunan politik yang berguna untuk memahami perkembangan sistem politik serta kemampuannya beradaptasi menghadapi perubahan serta tuntutan masyarakat. Pembangunan politik dalam kaitannya dengan pembangunan nasional Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

² Suryo Sakti Hadiwijoyo dan Fahima Diah Anisa. (2019). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Suatu Pengantar*. Depok: RajaGrafindo Persada. Hlm. 63-64

Hal tersebut disebabkan oleh keberhasilan dalam pembangunan politik akan menciptakan iklim yang kondusif bagi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Sehingga kajian mengenai pembangunan politik lebih banyak difokuskan untuk mengatasi berbagai permasalahan meliputi keanekaragaman, masalah disintegrasi bangsa serta masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.³

Melalui perspektif pembangunan politik, pembangunan dipandang bukan hanya sebagai hasil dari kebijakan, melainkan juga sebagai cerminan dari kualitas sistem politik yang menyelenggarakannya. Oleh karena itu, pembangunan politik dalam konteks pemerintahan daerah menjadi salah satu aspek penting karena pemerintah sendiri merupakan salah satu aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Kemampuan pemerintah dalam penyusunan kebijakan, berkolaborasi dengan berbagai unsur, mengelola partisipasi masyarakat dan lainnya menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas pembangunan.

Di beberapa kajiannya, konseptualisasi dari pembangunan politik (*political development*) memiliki arti yang berbeda dengan politik pembangunan (*politics of development*). Politik pembangunan menurut Moeljarto adalah cara untuk mencapai tujuan atau sebagai dasar pembangunan. Warjio menegaskan bahwa politik pembangunan bukan sekedar mengenai cara atau strategi yang hendak dicapai dalam

³ Zainul Djumadin. (2022). Demokrasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(2). Hlm. 307

pembangunan, tetapi juga menjadi sebuah pemikiran atau ideologi yang termaktub dalam pembangunan dari strategi dan cara yang dijalankan ini melibatkan banyak kelompok kepentingan.⁴

Jika politik pembangunan berkaitan dengan isu yang meliputi perencanaan, pembuatan kebijakan, strategi atau implementasi program tertentu yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di bidang politik, maka pembangunan politik mengandung makna yang lebih luas; menyangkut segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pemerintah atau negara untuk mengubah tatanan dan kondisi politik tertentu secara mendasar menuju ke suatu tatanan atau kondisi politik yang lebih rasional, sistematis dan fungsional.⁵

Gabriel A. Almond mendefinisikan pembangunan politik sebagai seperangkat struktur, proses dan perubahan kebijakan politik yang terjadi dalam konteks lebih luas dari modernisasi sosial-ekonomi.⁶ Adapun tujuan-tujuan dari pembangunan politik ini menurut Myron Weiner adalah sebagai bentuk integrasi politik, pemerintahan yang efisien, bersih dan berwibawa. Lebih lanjut, Huntington menambahkan lima tujuan lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional.⁷ Dalam mengelompokkan cirinya, Pye menegaskan bahwa

⁴ Warjio. (2016). *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: Kencana. Hlm. 106

⁵ Felix Tawaang, dkk. (2023). Membaca Ulang Konsep Modernisasi Politik, Pembangunan Politik, dan Demokrasi. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*. 4(2). Hlm. 733

⁶ Meidi Kosandi. (n.d). Pembangunan Politik: Modul 1, Pengertian pembangunan politik. Universitas Terbuka. Diakses melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM443403-M1.pdf>

⁷ Ramlan Surbakti. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. Hlm. 302

semestinya pembangunan politik mengembangkan nilai-nilai kesetaraan (*equality*), kapasitas sistem politik (*capacity*) serta diferensiasi dan spesialisasi (*differentiation and specialization*).⁸ Disisi lain, Huntington cenderung berpandangan bahwa karakteristik pembangunan politik seharusnya mengandung nilai-nilai demokrasi, integrasi, partisipasi dan rasionalisasi.⁹

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan politik adalah suatu perubahan politik terencana dari suatu kondisi ke kondisi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan melibatkan seluruh bagian masyarakat. Apabila dalam implementasi pembangunan politik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka akan melahirkan politik pembangunan yang sesuai dengan arah kesejahteraan, tujuan bernegara, pemerintah dan masyarakat. Selain itu, organisasi-organisasi politik perlu adanya kelembagaan yang baik karena memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan bersama dapat diwujudkan dengan pembentukan sebuah kebijakan (*policy*) yang sesuai dengan kondisi dan iklim masyarakat. Kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah harus berisikan nilai-nilai, tujuan dan kebutuhan masyarakat. Ketika kebijakan publik mengabaikan hal tersebut dan

⁸ Afan Gaffar. (1983). *Beberapa Aspek Pembangunan Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: CV Rajawali

⁹ Surbakti, *loc.cit.*

bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan menimbulkan resistensi ketika diimplementasikan.¹⁰ Oleh karena itu apabila dalam proses pembangunan di suatu daerah fungsi-fungsi dari organisasi politik termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah yang merupakan bagian dari proses pembangunan politik tidak berjalan sebagaimana mestinya dan mengikuti nilai-nilai yang ada maka akan muncul masalah-masalah pembangunan. Untuk itu sangat penting untuk memahami konsep pembangunan politik dalam melihat masalah-masalah pembangunan.

Dengan demikian, pembangunan politik secara konseptual diharapkan mampu memperkuat kapasitas institusi politik dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah. Namun, dalam realitanya berbagai daerah masih dihadapkan pada sejumlah persoalan pembangunan yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan politik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Kondisi inilah yang menegaskan pentingnya kajian terhadap pembangunan politik yang dilihat dari sisi praktisnya.

Kajian mengenai pembangunan politik tentu merupakan hal yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut dalam dunia penelitian. Beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai pembangunan politik adalah penelitian

¹⁰ Nuryanti Mustari. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Nouvalitera. Hlm.11

oleh Anyualatha Haridison (2013)¹¹ yang membahas keterkaitan pembangunan politik dengan demokrasi, *governance*, dan supremasi hukum; Dori Efendi dan Jayum Jawan (2017)¹² yang mengulas pembangunan politik dalam kaitannya dengan proses demokratisasi; Adityawarman (2020)¹³ yang mengkaji mengenai hubungan antara pembangunan politik dan kualitas demokrasi; Zainul Djumadin (2020)¹⁴ yang membahas pembangunan politik dalam perspektif modernisasi politik; serta penelitian oleh Felix Tawaang,dkk (2023)¹⁵ yang mengembangkan pembahasan mengenai pembangunan politik dalam beberapa konteks.

Dari penelitian terdahulu yang telah diidentifikasi, penelitian ini melihat bahwa kajian terdahulu berfokus pada pembahasan pembangunan politik secara konseptual, seperti pembahasan mengenai keterkaitan antara konsep pembangunan politik dengan beberapa variabel seperti, demokrasi, *governance*, supremasi hukum, demokrasi dan modernisasi politik. Pembangunan politik dari penelitian terdahulu tersebut lebih sering diposisikan sebagai konsep yang dibahas secara teoritis, daripada sebagai kerangka analisis dalam memahami suatu fenomena empiris di suatu daerah.

Berangkat dari beberapa penelitian diatas, penelitian ini melihat bahwa belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana pembangunan politik dari segi

¹¹ Anyualatha Haridison,(2013). Pembangunan Politik: Demokrasi, Governance dan Supremasi Hukum. *Jurnal Administrasi Publik*, FISIP Universitas Palangka Raya, 2337-4985.

¹² Dori Efendi dan Jayum Jawan. (2017). Pembangunan Politik Dan Pendemokrasian: Suatu Analisis Konseptual. *e-BANGI*, 12(3), 1-13.

¹³ Adityawarman. (2020). Pembangunan Politik Dan Kualitas Demokrasi. Moderat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), hlm: 397-409.

¹⁴ Djumadin, op.cit., hlm. 305-315

¹⁵ Tawaang, loc.cit., hlm. 721-750

praktisnya dilaksanakan dalam kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Padahal dalam konteks praktisnya, mengaitkan antara konsep pembangunan politik dan masalah pembangunan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana pembangunan politik dalam konteks praktisnya dilaksanakan dan mengaitkannya dengan masalah pembangunan yang terjadi di Kota Bukittinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan politik bukanlah sekedar perubahan politik melainkan juga kepada bagaimana pengembangan kesadaran politik masyarakat secara berkesinambungan dan berkeadilan. Oleh karena itu, pembangunan politik yang ideal merupakan salah satu hal mendasar dalam meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di sebuah tatanan sosial atau negara serta sistem politik.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan karakteristik politik lokal yang khas, dimana penyelenggaraan pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem pemerintahan formal sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, nilai-nilai sosial, budaya dan kelembagaan adat yang masih ada di tengah masyarakat turut mempengaruhi, sehingga interaksi antara pemerintahan formal dan sosial tersebut menghasilkan dinamika politik daerah yang khas. Selain itu, penerapan otonomi daerah yang hadir memberi kewenangan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan masing-masing dengan menyesuaikan kebutuhan daerah. Kondisi tersebut menjadikan Sumatera

Barat sebagai salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji melalui perspektif pembangunan politik, khususnya untuk melihat bagaimana sistem politik yang ada berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan konteks tersebut, Kota Bukittinggi dipilih sebagai lokasi penelitian karena posisinya yang menjadi salah satu kota strategis di Provinsi Sumatera Barat, yang berperan penting dalam berbagai sektor khususnya sektor perdagangan dan pariwisata. Posisi strategis itu mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalankan berbagai program pembangunan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat perekonomian daerah. pembangunan sebagai salah satu upaya yang ditempuh untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik dan mencapai kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Pengembangan sektor-sektor potensial merupakan bagian dari perumusan visi dan misi yang diterjemahkan ke dalam arsitektur perencanaan strategis berupa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

Namun beberapa upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam perjalanannya nyatanya menimbulkan berbagai polemik berupa adanya penolakan atau resistensi yang berasal dari masyarakat yang terdampak, pembangunan yang terbengkalai, adanya tuntutan dan permasalahan lainnya. Kondisi yang demikian menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga dengan

hubungan antara pemerintah, masyarakat dan kepentingan yang berbeda dalam proses pembangunan.

Salah satu contohnya adalah munculnya penolakan atau resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bukittinggi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2022. Peristiwa tersebut tentu saja bukan kasus pertama yang pernah terjadi di Kota Bukittinggi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa kebijakan atau upaya pembangunan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi, namun menuai respon dari masyarakat berupa penolakan atau resistensi dengan melakukan aksi demo.

Misalnya, masalah pembangunan di Kota Bukittinggi adalah munculnya resistensi atau penolakan atas rencana pembangunan Awning oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang dilakukan oleh pedagang pertokoan di Jl. Minangkabau Pasar Atas Kota Bukittinggi dan Niniak Mamak Kurai. Para pedagang tersebut menggelar aksi demo menolak rancangan pembangunan Awning tersebut dengan membentangkan poster penolakan, seperti *“Awning merampas hak publik. Walikota arogan, Pak Dewan dengarkan suara kami, jangan diam saja, jangan paksa kami Anarkis”*. Sebelumnya Wali Kota Erman Safar mengatakan bahwa tujuan pembangunan Awning ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Bukittinggi dan pemerintah memposisikan diri sebagai organisasi untuk seluruh pihak. Namun nyatanya seratus

persen pedagang menyatakan penolakan dan akan memperjuangkannya melalui jalur yang ada. Hal tersebut ditegaskan oleh Koordinator Aksi, Muhammad Fadhli.¹⁶

“...90 pemilik ruko di sini, semuanya menolak, segala jalan akan kami tempuh, penolakan ini harga mati, tidak akan ada langkah mundur, ada undang-undang yang akan terlanggar, tidak akan kami biarkan.”



Sumber: Sumbartime.com

Gambar 1.1 Penolakan pembangunan awning oleh pedagang pertokoan Jl. Minangkabau melalui aksi damai

Selain mendapat penolakan dari para pedagang tersebut, kebijakan rencana pembangunan Pemkot Bukittinggi ini nyatanya juga ditolak oleh Niniak Mamak Kurai. Pernyataan penolakan dari Niniak Mamak ini telah muncul sejak tanggal 20 Februari 2022. Melihat tidak adanya komunikasi dan respon dari Pemkot terhadap pernyataan tersebut, Niniak Mamak ini kembali mempertegas penolakan dengan membuat surat penolakan dengan tanggal surat 27 September 2022 yang ditandatangani oleh perwakilan Niniak Mamak Kurai Panga Tuo Nagari Kurai.¹⁷

¹⁶ Suara Sumbar. “Pedagang Jalan Minangkabau Bukittinggi Demo Tolak Pembangunan Awning”. <https://sumbar.suara.com/read/2022/09/30/205257/pedagang-jalan-minangkabau-bukittinggi-demo-> [diakses 29 Januari 2023 pukul 09.48 WIB]

¹⁷ Antara Sumbar. “Niniak Mamak Kurai Bukittinggi tolak pembangunan Awning Jalan Minangkabau”. <https://sumbar.antaranews.com/amp/berita/531945/niniak-mamak-kurai-bukittinggi->

Kurang lebih satu bulan setelah itu, pada 17 Oktober 2022 puluhan tokoh adat Kurai V Jorong melakukan aksi *longmarch* di sepanjang Jalan Minangkabau dengan menggunakan baju hitam-hitam dari *Medan nan Bapaneh* (Jam Gadang) ke *Medan nan Balinduang* (Rumah Adat Baanjuang) sebagai kelanjutan dari bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan Awning.¹⁸



Sumber: Katasumbar.com

Gambar 1.2 Aksi Longmarch Niniak Mamak Kurai sebagai respon menolak pembangunan awning di Jl. Minangkabau

Menyikapi respon penolakan yang muncul dari sejumlah pedagang pemilik pertokoan di sepanjang Jl.Minangkabau, serta aksi *longmarch* oleh Niniak mamak, pemerintah Kota Bukittinggi memutuskan untuk menunda rencana pembangunan awning tersebut.

Kasus lainnya adalah mengenai penutupan proyek pusat kuliner yang digagas oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sejak 2022. Stasiun Lambuang merupakan salah

[tolak-%20pembangunan-awning-jalan-minangkabau](#) [diakses tanggal 29 Januari 2023 pukul 10.14 WIB]

¹⁸ Lensasumbar.com “Niniak Mamak Kurai V Jorong Tolak Pembuatan Awning di Jalan Minangkabau” <https://lensasumbar.com/2022/10/17/niniak-mamak-kurai-v-jorong-tolak-pembuatan-awning-jalan-minangkabau/> [diakses 29 Januari 2023 pukul 10.21 WIB]

satu proyek yang digadang-gadang menjadi pusat kuliner terbesar di Sumbar yang diresmikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir bersama anggota DPR RI, Andre Rosiade, pada Maret 2024 bersama Wali Kota pada periode itu yaitu Erman Safar. Pembangunan stasiun lambuang yang dibangun dengan konstruksi portabel ini merupakan sebagai solusi penempatan pedagang makanan yang memanfaatkan fasilitas umum di jalan M. Syafei, jalan Ahmad Yani dan jalan perintis kemerdekaan. Pedagang akan direlokasi ke kawasan tersebut dekan sistem retribusi atau sewa.



Sumber: Padang.tribunnews.com

Gambar 1.3 Stasiun Lambuang

Walaupun sempat dibanjiri dengan kedatangan oleh pengunjung, baik pengunjung dari Kota Bukittinggi maupun luar kota, namun satu tahun berjalan sejak diresmikan Stasiun Lambuang dikabarkan akan segera ditutup. Penutupan proyek ini

didasarkan pada penghasilan Pendapatan Asli Daerah yang hanya mencapai 2,5 Juta Rupiah (kontribusi langsung dari pedagang) dalam kurun waktu tiga tahun. Pemasukan PAD tersebut hanya berasal dari retribusi pedagang, sehingga perputaran uang yang terjadi sangat kecil dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah yang mengucurkan biaya sewa lahan kepada PT. KAI yang mencapai 2,3 miliar per tahun. Sehingga dinilai membebani keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dan lahan dikembalikan ke PT KAI, dengan alasan efisiensi dan keberadaaan Stasiun Lambuang yang belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.¹⁹

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi saat itu mengkonfirmasi bahwa tujuan awal penyewaan lahan PT. KAI ini adalah untuk memfasilitasi pedagang kaki lima dan mendongkrak PAD dengan hasil retribusinya. Namun setelah satu tahun beroperasi, Proyek Stasiun Lambung tidak memenuhi biaya kontrak, biaya operasional dan biaya kebersihan dan perawatan. Ia juga melihat bahwa setelah berjalan, pelaku usaha pada umumnya tidak bersemangat untuk memanfaatkan Stasiun Lambuang dan menilai bahwa kemauan masyarakat yang masih rendah.²⁰

Selain kepada dua kasus di atas, penolakan juga pernah muncul terkait dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No.3 Tahun 2022 yang disahkan oleh

¹⁹ Kompas.com. “PAD Hanya Rp. 2,5 Juta Selama 3 Tahun, Stasiun Lambuang Bukittinggi Senilai Rp. 24,5 M ditutup” <https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/05/31/102925188/pad-hanya-rp-25-juta-selama-3-tahun-stasiun-lambung-bukittinggi> [diakses tanggal 30 September 2025 11.06 WIB]

²⁰ KABA12. “Stasiun Lambuang Kurang Menghasilkan, Pemko Bukittinggi Bahas Pemutusan Kontrak dengan PT.KAI” <https://kaba12.co.id/stasiun-lambung-kurang-menghasilkan-pemko-bukittinggi-bahas-pemutusan-kontrak-dengan-pt-kai/> [diakses tanggal 30 September 2025 11.16 WIB]

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD. Penolakan muncul dari para pedagang di kawasan pasar atas, pasar bawah dan pasar aur kuning yang merasa bahwa Perda tentang pengelolaan pasar merugikan pedagang, khususnya pasal 15 karena dianggap memiskinkan seluruh pedagang.²¹. Begitu juga dengan kepemilikan kios pertokoan di Pasar Atas Kota Bukittinggi. Masalah ini berawal dari kebakaran yang terjadi pada Pusat Pertokoan Pasar Atas Kota Bukittinggi yang terjadi 30 Oktober 2017, yang menhanguskan ratusan kios milik pedagang. Sesaat setelah selesai direhabilitasi, Pemda Bukittinggi membuat ketentuan sepihak yang dirasa menghilangkan hak pemilik toko, dengan bertindak seperti pengusaha swasta, dimana toko-toko yang dibiayai pemerintah pusat akan disewakan kepada para pedagang. Secara sistematis, tanpa pernah bermusyawarah, pemda mewajibkan pedagang yang merupakan korban bencana kebakaran mendaftar ulang. Bagi yang tidak mendaftar ulang kehilangan hak sepenuhnya dan dialihkan kepada penyewa baru. Keputusan sepihak oleh pemda Bukittinggi memunculkan respon berupa pernyataan tidak setuju dengan penyampaian aspirasi berbagai masalah yang dihadapi pedagang pemegang hak kartu kuning pasar atas, perwakilan pedagang melalui ketua DPRD meminta agar kepala dinas koperasi mencabut atau membatalkan ketentuan tersebut.

Begitu juga dengan masalah tanah konsolidasi di jalan *bypass*, Konsolidasi jalan *bypass* yang berlangsung sejak tahun 1992. Pembangunan jalan *bypass* akan

²¹Sumbar Antara News. “Pedagang Bukittinggi Unjuk Rasa Menentang Perda Pengelolaan Pasar”. <https://sumbar.antaranews.com/berita/537421/pedagang-bukittinggi-unjuk-rasa-menentang-perda-pengelolaan-pasar> [diakses 8 April 2023 pukul 22.14]

dilakukan sepanjang 9,4 km dengan lebar jalan 26 m, melalui tiga kecamatan di Kota Bukittinggi, dan mendapat persetujuan dari masyarakat pemilik tanah ulayat, dengan kesepakatan masyarakat setuju melepaskan sebagian hak atas tanahnya sebanyak 15 persen untuk disumbangkan dalam konsolidasi tanah tanpa ganti rugi berupa uang, namun dalam bentuk berupa lingkungan yang tertata rapi, semua tanah menghadap ke jalan, terdapat fasilitas umum dan sosial serta memperoleh sertifikat sebagai kompensasi atas tanah yang disumbangkan.²² Namun dalam perjalanannya pembangunan tersebut melahirkan banyak konflik dimana masyarakat menolak ikut dalam konsolidasi dan menuntut pemerintah karena tidak konsisten dalam kesepakatan.

Dari beberapa masalah yang telah diakumulasikan tersebut, penelitian ini melihat bahwa permasalahan munculnya gerakan penolakan atau resistensi, isu dan tuntutan oleh masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk keadaan instabilitas yang terjadi di tengah sistem sosial politik di Kota Bukittinggi. Instabilitas politik terjadi apabila kebijakan politik terlalu kaku dan tidak luwes untuk disesuaikan dengan keseimbangan nilai yang selalu berubah dalam masyarakat. Sederhananya instabilitas dapat dihubungkan dengan perubahan yang tidak berhasil memuaskan keinginan masyarakat dan menimbulkan rasa kecewa pada masyarakat yang berubah. Maka disinilah peran pembangunan politik yang ideal perlu dipahami dan diterapkan dalam sistem politik.

²² Senmei Wardhatul Nur, dkk. (2020). Merancang Penyelesaian Konflik Konsolidasi Tanah *By Pass* Di Kota Bukittinggi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1): hlm.44-45

Kota Bukittinggi sebagai daerah otonom pada dasarnya, telah memiliki berbagai instrumen dan mekanisme yang dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, serta menentukan arah kebijakan pembangunan. Hal tersebut antara lain terlihat dari adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kanal pengaduan atau penyampaian keluhan masyarakat melalui media daring, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja (Renja), serta berbagai regulasi dan prosedur perencanaan lainnya. Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan pemerintah sebenarnya telah memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pembangunan, dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

Dengan demikian, munculnya persoalan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bukittinggi bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan prosedur atau sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah. Persoalannya justru terletak pada bagaimana mekanisme tersebut dijalankan dan sejauh mana hasil dari proses perencanaan serta aspirasi masyarakat benar-benar menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Artinya, terdapat perbedaan antara keberadaan instrumen secara formal dengan pelaksanaannya dalam praktik. Kondisi inilah yang kemudian menjadi penting untuk dilihat dalam perspektif pembangunan politik, karena keberadaan institusi dan prosedur belum tentu menunjukkan bahwa fungsi institusi tersebut telah berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan konseptual pembangunan politik dengan bagaimana pelaksanaannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga menimbulkan masalah-masalah pembangunan yang terjadi di Kota Bukittinggi. Pembangunan politik yang digunakan dalam penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada kemampuan institusi politik untuk menjadi adaptif, kompleks, otonom dan koheren. Munculnya masalah pembangunan di suatu daerah justru karena kebijakan yang berubah-ubah, dominasi elite politik dan pemerintahan, birokrasi dipolitisasi, termasuk

Oleh karena itu, permasalahan pembangunan selama ini lebih dilihat dari gejala perencanaan pembangunan, tata kelola, partisipasi masyarakat, kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini justru melihat dari aspek yang lebih fundamental, yaitu pembangunan politik. Asumsi penelitian ini adalah bahwa kegagalan pembangunan daerah bukan akibat dari kurangnya perencanaan dan masalah lainnya, melainkan akibat rendahnya institusionalisasi politik dalam pemerintah daerah akibat tidak terlaksananya pembangunan politik sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan data tersebut, penelitian ini tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai pembangunan politik yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi, dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah maka dapat dirumuskan

pertanyaan penelitian, yaitu: **“Mengapa pembangunan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi memunculkan masalah pembangunan?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah, untuk menjelaskan penyebab pembangunan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi memunculkan masalah pembangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang kajian ilmu politik. Utamanya dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan khususnya mengenai pembangunan politik yang berkaitan dengan masalah-masalah praktiknya.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan lanjutan atau referensi tambahan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan politik di suatu daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan gambaran praktis bagi seluruh kalangan serta menjadi pedoman dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan politik.